

PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN BAGI PARA VENDOR PT KFG

Juniati Gunawan, Khomsiyah, Ayu Aulia Oktaviani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

* Penulis Korespondensi : juniatigunawan@trisakti.ac.id

Abstrak

Sebagai bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, sekelompok dosen Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Trisakti bekerja sama dengan Global Reporting Initiative (GRI) Indonesia dan PT KFG telah menyelenggarakan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul kegiatan "Pelatihan Penyusunan Laporan Keberlanjutan bagi Para Vendor PT KFG". Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para vendor PT KFG dalam menyusun Laporan Keberlanjutan sesuai dengan pedoman GRI. Perusahaan harus mampu mengkomunikasikan semua aspek, tidak hanya pengelolaan ekonomi namun juga lingkungan hidup dan sosial. Masalah utama dalam keberlanjutan para vendor PT KFG yaitu kurang maksimalnya sosialisasi pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya Laporan Keberlanjutan. Padahal laporan tersebut sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dianggap akuntabel terhadap seluruh stakeholders untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. Para peserta pelatihan juga diberikan pemahaman terkait aturan di Indonesia bahwa Perusahaan terbuka di Indonesia harus menyampaikan laporan keberlanjutan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai tahun 2021, sementara untuk perusahaan non-terbuka sifatnya masih voluntary. Setelah adanya pelatihan ini para vendor PT KFG semakin memahami pentingnya laporan keberlanjutan untuk keberlangsungan usahanya.

Kata kunci: laporan keberlanjutan, pengabdian kepada masyarakat, GRI, OJK

Abstract

As a form of implementing the Tridharma of Higher Education, a group of lecturers from the Bachelor of Accounting Study Program at Trisakti University in collaboration with the Global Reporting Initiative (GRI) Indonesia and PT KFG have organized a Community Service (PKM) program with the activity title "Training for Compiling Sustainability Report for PT KFG Vendors. ". This training aims to improve the ability of PT KFG vendors in compiling a sustainability report in accordance with GRI guidelines. Companies must be able to communicate all aspects, not only economic management but also environmental and social management. The main problem in the sustainability of PT KFG vendors is the lack of maximum dissemination of knowledge and understanding of the importance of the sustainability report. In fact, the report is needed to measure the extent to which the company is considered accountable to all stakeholders to support sustainable development efforts. The training participants were also given an understanding of the rules in Indonesia that publicly listed companies in Indonesia must submit a sustainability report to the Financial Services Authority (OJK) starting in 2021, while for non-public companies it is still voluntary. After this training, PT KFG vendors increasingly understand the importance of sustainability report for business continuity.

Kata kunci: Sustainability reporting, community service, GRI, OJK

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun ini banyak media informasi memaparkan sejumlah kasus lingkungan hidup dan konflik sosial-ekonomi yang melibatkan perusahaan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di sekitarnya. Keterbukaan informasi perusahaan terkait upaya dan hasil pengelolaan ekonomi, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan lingkungan hidup saat ini menjadi sangat diperlukan. Fokus utama suatu perusahaan dalam

menjalankan bisnisnya bukan hanya laba semata, melainkan manfaat yang dapat diberikan kepada pemangku kepentingan (Brulhart et al., 2019). Transparansi informasi akan memperkecil dugaan negatif dan 'memaksa' perusahaan selalu melakukan yang terbaik. Selain itu, pengungkapan informasi atas kinerja dan risiko yang disajikan dapat memberikan gambaran kondisi suatu perusahaan dalam satu periode tertentu (Burhany et al., 2020).

Penyampaian informasi terkait kinerja perusahaan tersebut biasanya disampaikan melalui laporan tahunan oleh sebagian besar perusahaan, khususnya perusahaan terbuka (Vinuesa et al., 2020). Laporan tahunan yakni laporan yang terintegrasi untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu pencapaian dan rincian aktivitas suatu perusahaan dalam aspek keuangan maupun non-keuangan (Adhariani & du Toit, 2020; Papoutsi & Sodhi, 2020). Laporan tahunan disajikan secara informatif agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan seperti: pemegang saham, karyawan, vendor, investor dan pemerintah dalam mengambil keputusan dan sarana pengawasan terhadap perusahaan publik.

Menurut Global Sustainability Standards Board, (2021) laporan keberlanjutan adalah media informasi bagi pemangku kepentingan mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan (GRI, 2020). Hal ini sejalan juga dengan konsep Tripple-Bottom Line yang dikemukakan oleh John Elkington di tahun 1988.

Hingga saat ini, semakin banyak laporan keberlanjutan telah diakui dalam bisnis global, termasuk Indonesia. Pada September 2018, World Bank menyatakan bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh kuat. Situasi ini berpotensi membawa pertumbuhan inklusif jika Indonesia mampu menjaga kondisi ekonomi (Astuti & Putri, 2019). Pertumbuhan tersebut tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan dalam jangka panjang. Akibatnya, kegiatan keberlanjutan harus dilakukan dan harus tertanam sebagai strategi bisnis bagi semua perusahaan (Latifah & Luhur, 2017; Sandri et al., 2020).

Jumlah laporan keberlanjutan meningkat secara eksponensial, dari 6 laporan pada tahun 2009 menjadi 37 pada tahun 2014 dan lebih dari 200 laporan pada akhir tahun 2018, termasuk laporan dari publik dan non-perusahaan publik (PWC, 2018). Meningkatnya jumlah laporan keberlanjutan dapat menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang sadar untuk menginformasikan kegiatan keberlanjutan mereka kepada pemangku kepentingan, atau ada lebih banyak tekanan dari pemangku kepentingan untuk mempublikasikan laporan keberlanjutan (Farha et al., 2020; Setyawan et al., 2022).

Menanggapi permintaan informasi dan keadaan pengungkapan perusahaan saat ini, banyak organisasi menawarkan standar pelaporan karena pelaporan dianggap sukarela (Amalia et al., 2019; Widyaningsih, 2020). Sama halnya dengan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia hanya bersifat sukarela hingga akhir tahun 2016. Meskipun pengungkapan laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela, terdapat 9% perusahaan yang tercatat di Bursa Indonesia Exchange

menerbitkan laporan keberlanjutan mereka (OJK, 2017). Persentase ini mengacu pada 49 laporan keberlanjutan dimana diantaranya terdapat lembaga jasa keuangan, perusahaan public, dan perusahaan non-publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Gunawan, (2021) perkembangan laporan keberlanjutan Indonesia dimulai sejak tahun 2006 hingga akhirnya pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No.51/POJK.03/2017 merupakan peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk di dalamnya standar terkait penyusunan laporan keberlanjutan bagi perusahaan terbuka. Selain POJK 51, standar yang banyak digunakan oleh perusahaan di dunia yaitu Global Reporting Initiatives (GRI) (Rahmawati et al., 2020; Widiastuty & Soewarno, 2019).

Isi dalam laporan keberlanjutan tidak terlepas dari kegiatan maupun program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, pada kenyataannya, pola pikir rata-rata perusahaan bahwa kegiatan TJSL atau lebih sering dikenal *corporate social responsibility* (CSR) adalah kegiatan berbagi (Carroll, 2016; Grimstad et al., 2020). Pada kenyataannya, yang diharapkan oleh pemerintah dari program TJSL perusahaan adalah pembangunan bagi seluruh masyarakat yang juga telah dirumuskan secara global oleh United Nations untuk mendukung capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Negara Indonesia telah menjadi salah satu dari 193 negara di seluruh dunia yang mendeklarasikan untuk mendukung agenda global dalam pembangunan berkelanjutan (Etikariena, 2020).

Dalam mendukung agenda global tersebut, pemerintah tidak dapat melakukannya sendirian, perlu dukungan dari berbagai organisasi baik pemerintahan dan non-pemerintahan salah satunya adalah perusahaan (Hidayah et al., 2021). Hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menyusun program TJSL sesuai dengan 17 tujuan yang tertuang dalam SDGs (Cheng et al., 2021). Perusahaan dapat memilih beberapa dari ke-17 tujuan yang tertuang dalam SDGs. Diharapkan, perusahaan dapat menyampaikan tujuan yang didukung, kegiatannya, serta target kedepannya sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan (Brulhart et al., 2019; Nden, 2019).

Mengingat laporan keberlanjutan wajib di-submit oleh perusahaan ke OJK pada tahun 2021, PT KFG menginginkan para vendornya memiliki semangat keberlanjutan yang sama, bukan semata-mata hanya kepentingan sendiri. PT KFG melihat bahwa diperlukan pemahaman yang lebih baik bagi perusahaan di Indonesia dalam segala aspek dan bagaimana melakukan penyusunan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dianggap akuntabel terhadap seluruh

stakeholders untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan (Andrian et al., 2021).

Hal ini sejalan dengan semangat para dosen Universitas Trisakti untuk memberikan pendampingan melalui pelatihan. Saat pelatihan, para fasilitator menyadari bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan dan standar yang berlaku di Indonesia maupun internasional sebagai pedoman untuk menyusun laporan keberlanjutan yang baik, efisien dan efektif bagi pemangku kepentingan, khususnya para investor yang sudah mulai peduli terkait kinerja keberlanjutan perusahaan (Tan, 2021).

1.1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

TJSL merupakan respon dari perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan melalui pemberian pelayanan sosial (Rahmawati et al., 2020; Widiastuty & Soewarno, 2019). Isu sustainability atau keberlanjutan dan isu lingkungan menjadi tantangan sekaligus trend dan tuntutan dari pasar global. Konsep TJSL memberikan pandangan bagi perusahaan agar tidak hanya mengejar keuntungan (profit) namun lebih memperhatikan lingkungan (planet) dan juga kesejahteraan masyarakat (people) (Karundeng et al., 2017). Mengingat situasi bahwa TJSL dan praktik keberlanjutan masih didasarkan pada basis sukarela, terdapat argumen bahwa di negara berkembang dan maju, undang-undang atau peraturan diperlukan untuk mendukung praktik keberlanjutan (Jackson et al., 2020).

Hingga saat ini, Indonesia dianggap sebagai negara pertama di dunia yang mengadopsi pendekatan wajib TJSL pada tahun 2007 (Kriyantono, 2015; Siregar et al., 2019). Namun, meski sudah ada regulasi mewajibkan TJSL, mereka belum mempertimbangkan konsekuensi potensial materi finansial dan pengungkapan informasi tentang dampak perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. Situasi ini membuat regulasi kurang efektif dalam mengamankan praktik TJSL.

Menurut Oware & Mallikarjunappa, (2022), teori TJSL telah banyak digunakan sebagai landasan untuk memediasi hubungan antara bisnis dan masyarakat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu teori utama TJSL saat ini, misalnya teori Carroll, mengeksplorasi bahwa ada empat kategori piramida TJSL, yang sebelumnya telah digunakan secara luas sebagai teori umum TJSL (Carroll, 2016). Empat kategori CSR Carroll awalnya dinyatakan sebagai: "tanggung jawab sosial perusahaan meliputi harapan ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan (filantropi) yang dimiliki masyarakat terhadap organisasi pada titik waktu tertentu" (B. Carroll, 2015). Serangkaian empat tanggung jawab ini yang menciptakan landasan yang membantu menggambar beberapa detail dan mengkarakterisasi sifat tanggung jawab bisnis kepada masyarakat.

1.2 Laporan Keberlanjutan

Pelaporan keberlanjutan telah luas dalam beberapa decade terakhir dan telah membantu organisasi untuk merefleksikan dan mengkomunikasikan komitmen mereka terhadap isu-isu keberlanjutan (Anindita, 2013; Kurniawan, 2017). Laporan keberlanjutan sebagian besar dilakukan dalam bentuk tambahan untuk laporan tahunan tradisional dan didefinisikan sebagai "praktik mengukur, mengungkapkan, dan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk kinerja organisasi menuju tujuan pembangunan berkelanjutan" (Gokten & Gokten, 2018; Janggu et al., 2014). Berdasarkan uraian pembangunan berkelanjutan, Global Reporting Initiatives (GRI) meluncurkan standarisasi pelaporan keberlanjutan yang laporannya akan digunakan untuk mengungkapkan CSR dan praktik keberlanjutan (GRI, 2020).

Dengan memiliki pedoman, pemangku kepentingan juga dapat dengan mudah membandingkan dan memahami apa yang seharusnya terdapat dalam pelaporan keberlanjutan. Seperti yang dikemukakan oleh Christensen et al. (2021), standar digunakan untuk meningkatkan komparabilitas antar perusahaan. Standar tersebut juga digunakan agar perusahaan memiliki pedoman yang jelas tentang aspek-aspek yang harus diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. GRI (2016) menjelaskan bahwa standar juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan. Perusahaan dalam semua ukuran, serta organisasi nirlaba, juga dapat menggunakan pedoman ini. Sebuah laporan yang diterbitkan oleh KPMG (2020) menunjukkan bahwa kerangka kerja GRI adalah yang paling umum digunakan, dengan 63 persen laporan N100 dan 75 persen laporan G250 menerapkan panduan. Selain itu, GRI terus meningkatkan kinerjanya dengan secara aktif meningkatkan pedoman untuk menjadi standar global untuk keberlanjutan pada tahun 2016.

2. BAHAN DAN METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini melalui pelatihan dengan pendekatan dalam proses penyampaian pengetahuan mengenai konsep laporan keberlanjutan dan menentukan topik material bagi tiap-tiap vendor PT KFG. Pelatihan ini dilaksanakan bersama dengan mitra PKM yaitu GRI secara luring selama satu hari di kampus Universitas Trisakti, Jakarta pada 1 Februari 2019, dengan peserta sebanyak 41 orang (Gambar 1). Dari penentuan topik material tersebut maka tiap vendor PT KFG dapat merumuskan isu-isu penting bagi tiap vendor, cara merespon tiap isu yang telah dirumuskan, dan melaporkannya dalam laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI.



Gambar 1. Pelatihan Laporan Keberlanjutan

Adapun materi yang diberikan pada kegiatan PKM ini berkaitan dengan pentingnya pemahaman mengenai kebijakan maupun standar internasional yang berlaku dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Materi ini menjadi fokus utama karena pada tahun 2021, seluruh perusahaan terbuka di Indonesia wajib untuk submit laporan keberlanjutan ke OJK sesuai dengan POJK No.51/POJK.03/2017 yang merupakan peraturan terkait penerapan keuangan berkelanjutan. Perusahaan juga diharapkan dapat menyampaikan kinerja positif dan negatif yang seimbang dari kegiatan operasional perusahaan menurut standar GRI sebagai pedoman yang paling banyak dipakai di dunia.

Selama proses pelatihan terkait materi PKM, para tim dosen FEB beserta lima mahasiswa FEB berperan sebagai fasilitator untuk menyusun modul dan menyampaikan materi semenarik mungkin dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh para peserta, mengingat pelatihan ini hanya dilaksanakan dalam durasi yang singkat. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sebagai modal awal untuk membuat laporan keberlanjutan yang baik terutama serta dapat melihat peluang (*opportunities*) dan menanggulangi risiko (*risks*) dalam kegiatan perusahaan masing-masing vendor. Selama pelatihan, materi disampaikan secara interaktif dengan melibatkan peserta dalam menjawab pertanyaan atas materi yang telah disampaikan, menyampaikan pertanyaan maupun pendapat terkait kebijakan dan penyusunan laporan keberlanjutan.

Awal dari kegiatan pelatihan ini adalah pemaparan tentang kegunaan laporan keberlanjutan dan kebijakan maupun standar yang digunakan di Indonesia maupun di dunia. Sesi pemaparan disampaikan oleh para dosen FEB Universitas Trisakti yang terlibat dalam PKM ini dan mitra PKM, yaitu GRI. Setelah itu, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh para fasilitator. Dalam proses tanya dan jawab tersebut, para fasilitator mencoba untuk mengulik lebih dalam terkait tantangan dan peluang yang ada dalam

proses bisnis dari masing-masing perusahaan yang mana hasil dari diskusi tersebut dapat menjadi contoh topik material bagi perusahaan. Setelah sesi tanya jawab, para peserta diwajibkan untuk melakukan pengisian biodata perusahaan masing-masing dan melakukan diskusi antar kelompok untuk menentukan topik-topik material apa yang sesuai dengan latar belakang bisnis perusahaan masing-masing dan mencari cara ataupun kegiatan untuk menanggapi isu-isu yang muncul dari tiap topik material yang telah ditentukan oleh masing-masing peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan ini, banyak perusahaan yang sudah mulai memahami bahwa di Indonesia adanya peraturan yang mengatur isi dalam penyusunan laporan keberlanjutan yakni POJK 51 dan standar GRI yang digunakan di dunia. Beberapa peserta juga menyadari bahwa pemenuhan pada pedoman GRI cukup sulit dikarenakan permintaan informasi dari tiap indeks cukup mendalam dan beberapa informasi bagi mereka adalah rahasia internal perusahaan.

Dalam proses mencoba untuk menyusun laporan, para peserta juga menyadari bahwa stakeholder mereka bukan hanya dari dalam negeri, namun ada juga dari mancanegara. Maka dari itu, para peserta mulai mencari laporan keberlanjutan dari peer masing-masing perusahaan dari luar negeri, untuk melihat isi laporan keberlanjutan seperti apa yang sudah disajikan dan melihat pemenuhan serta transparansi pengungkapan informasi sesuai dengan standar yang paling banyak dipakai di dunia yaitu GRI.

Para peserta juga mulai menyadari bahwa banyak inisiatif-inisiatif program CSR mereka yang masih kurang memberikan dampak bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Masih banyak perusahaan yang melaksanakan program CSR dengan bentuk sumbangan secara cuma-cuma (Scherer & Palazzo, 2011). Pada kenyataannya, CSR tidak hanya kegiatan untuk melakukan sumbangan saja, namun harus ada nilai tambah yang dirasakan oleh kedua belah pihak, yakni perusahaan dengan sekitarnya. Supaya perusahaan tidak hanya membuat program CSR yang monoton, para fasilitator menyarankan untuk membuat kegiatan CSR dengan mendukung agenda global yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan. Para fasilitator juga sedikit menjelaskan arti tentang creating shared value, di mana perusahaan dapat bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk saling memberikan dampak positif seperti, memperkerjakan masyarakat sekitar, membeli bahan baku dari masyarakat sekitar wilayah operasional dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, kehadiran perusahaan jauh lebih bermanfaat karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya dan mengurangi pengangguran. Hal ini akan jauh lebih

berdampak luas sekaligus dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, dibandingkan pemberian cuma-cuma yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Setelah melakukan diskusi dan membandingkan laporan keberlanjutan dari masing-masing peer, para vendor PT KFG sudah lebih memahami manfaat dan pentingnya laporan keberlanjutan yang baik. Laporan keberlanjutan yang baik seharusnya menyimpulkan kinerja positif dan negatif yang seimbang. Baik kinerja dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Keseimbangan dari isi laporan keberlanjutan, menjadi hal yang penting untuk melihat bagaimana respon perusahaan dalam menanggapi masalah yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi limbah maupun emisi yang dihasilkan meskipun terjadi peningkatan produksi atau permintaan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor utama keputusan para investor, khususnya investor luar negeri karena akan melihat transparansi dan akuntabilitas perusahaan berdasarkan laporan yang disajikan.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar karena adanya faktor pendukung yakni, adanya kerja sama dengan pihak GRI Indonesia bersama PT KFG untuk menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pelatihan. Namun, waktu pelaksanaan dirasa kurang untuk bisa membantu para peserta menyusun laporan keberlanjutan secara lengkap sesuai dengan standar GRI.

Secara keseluruhan, para perwakilan dari masing-masing vendor sudah memahami pentingnya menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku baik di Indonesia maupun di dunia sehingga para vendor dapat melakukan penyusunan laporan keberlanjutan yang efisien dan efektif, serta dapat meningkatkan kualitas pengungkapannya. Selain itu, menentukan target, dan melihat peluang serta risiko yang terjadi dalam kegiatan operasional masing-masing perusahaan untuk diceritakan dalam laporan keberlanjutan.

PT KFG berharap dengan diadakannya pelatihan ini, para vendor memiliki pemahaman dan semangat terkait keberlanjutan yang sama dalam meningkatkan sinergi bisnis di masing-masing perusahaan. Para fasilitator dan mitra PKM berharap setelah diadakannya pelatihan ini, semakin banyak perusahaan yang memahami bagaimana cara menyusun laporan keberlanjutan yang efektif, dan efisien sehingga kedepannya laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia memiliki kualitas yang semakin baik.

4. KESIMPULAN

Setelah adanya pelatihan ini para vendor PT KFG mengetahui betapa pentingnya laporan keberlanjutan untuk keberlangsungan usahanya. Para peserta pelatihan juga diberitahukan terkait aturan di Indonesia bahwa

Perusahaan terbuka di Indonesia harus submit laporan keberlanjutan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai tahun 2021, sementara untuk perusahaan non-terbuka sifatnya masih sukarela.

Pemahaman terkait penyusunan laporan keberlanjutan di Indonesia masih sangat sedikit. Banyak perusahaan yang masih belum memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana cara menyusun laporan keberlanjutan yang baik dan benar. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya sosialisasi terkait penyusunan laporan keberlanjutan dan peraturan maupun standar yang berlaku serta perusahaan belum menyadari manfaat dari penyusunan laporan keberlanjutan. Banyak perusahaan baru menyadari bahwa ada tiga aspek yang harus dituangkan dalam laporan keberlanjutan, yakni: aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan atau lebih sering didengar prinsip *Triple bottomline* (Arthur et al., 2017; Jones & Comfort, 2018). Para peserta juga menyadari bahwa dalam kegiatan CSR-nya masih belum memperhatikan 17 tujuan yang ada dalam SDGs dan sudah mulai menyadari untuk memilih tujuan mana yang akan didukung sesuai dengan kegiatan bisnis perusahaan.

Oleh karena itu, maksud dan tujuan PT KFG melaksanakan pelatihan ini juga bukan hanya untuk kepentingan sendiri, namun agar vendor dapat dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI. Diharapkan jejak PT KFG untuk merangkul vendornya dalam pelatihan ini, dapat ditiru oleh perusahaan besar lain. Seiring berjalannya waktu, baik perusahaan maupun vendor akan mampu meningkatkan kinerja di bidang keberlanjutan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada PT. KFG karena telah bekerja sama dalam proses pelatihan penyusunan Laporan Keberlanjutan. Terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti karena telah mengalokasikan dana program pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhariani, D., & du Toit, E. (2020). Readability of sustainability reports: evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 10(4). <https://doi.org/10.1108/JAEE-10-2019-0194>
- Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1). <https://doi.org/10.14710/jil.17.1.130-139>

- Anindita, M. Y. K. P. (2013). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan tipe industri terhadap pengungkapan sukarela pelaporan keberlanjutan. *E-Journal Uajy*.
- Arthur, C. L., Wu, J., Yago, M., & Zhang, J. (2017). Investigating performance indicators disclosure in sustainability reports of large mining companies in Ghana. *Corporate Governance (Bingley)*, 17(4). <https://doi.org/10.1108/CG-05-2016-0124>
- Astuti, F., & Putri, W. H. (2019). Studi komparasi kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan konstruksi dalam dan luar negeri. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 1(40).
- B. Carroll, A. (2015). Corporate Social Responsibility (CSR) is on a Sustainable Trajectory. *Journal of Defense Management*, 05(02). <https://doi.org/10.4172/2167-0374.1000132>
- Brulhart, F., Gherra, S., & Quelin, B. v. (2019). Do Stakeholder Orientation and Environmental Proactivity Impact Firm Profitability? *Journal of Business Ethics*, 158(1). <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3732-y>
- Burhany, D. I., Dahtiah, N., & Syarief, A. (2020). PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL BESERTA DETERMINANNYA. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(3). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4531>
- Carroll, A. B. (2016). Carroll's pyramid of CSR: taking another look. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 1(1). <https://doi.org/10.1186/s40991-016-0004-6>
- Cheng, Y., Liu, H., Wang, S., Cui, X., & Li, Q. (2021). Global action on sdgs: Policy review and outlook in a post-pandemic era. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 13, Issue 11). <https://doi.org/10.3390/su13116461>
- Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2021). Mandatory CSR and sustainability reporting: economic analysis and literature review. *Review of Accounting Studies*, 26(3). <https://doi.org/10.1007/s11142-021-09609-5>
- Etikariena, A. (2020). *Encouraging innovative work behavior among college students through quality education to succeed the SDGs. 01016*, 1–12.
- Farha, Handajani, L., & Surasni, N. K. (2020). Peran Konservatisme Akuntansi Dalam Pengaruh Financial Distres Dan Tingkat Hutang Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3).
- Gokten, P. O., & Gokten, S. (2018). *Sustainability Reporting and Multilevel Governance*. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5547-6.ch006>
- GRI. (2020). GRI Standards Glossary 2020. *GRI Standards*.
- Grimstad, S. M. F., Glavee-Geo, R., & Fjörtoft, B. E. (2020). SMEs motivations for CSR: an exploratory study. *European Business Review*, 32(4). <https://doi.org/10.1108/EBR-01-2019-0014>
- Gunawan, J. (2021). *Corporate Social Responsibility in Indonesia*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68386-3_34
- Hidayah, N., Nugroho, L., Prihanto, H., & Prihantini, D. (2021). Company Characteristics , Disclosure of Social Responsibility , and its Impact on Company Performance : An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6).
- Jackson, G., Bartosch, J., Avetisyan, E., Kinderman, D., & Knudsen, J. S. (2020). Mandatory Non-financial Disclosure and Its Influence on CSR: An International Comparison. *Journal of Business Ethics*, 162(2). <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04200-0>
- Jangu, T., Darus, F., Zain, M. M., & Sawani, Y. (2014). Does Good Corporate Governance Lead to Better Sustainability Reporting? An Analysis Using Structural Equation Modeling. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 138–145. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.020>
- Jones, P., & Comfort, D. (2018). Storytelling and Sustainability Reporting: An Exploratory Study of Leading US Retailers. *Athens Journal of Business & Economics*, 4(2). <https://doi.org/10.30958/ajbe.4.2.2>
- Karundeng, F., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas, Kepemilikan Manajemen dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2012-2016). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.16901>
- KPMG. (2020). The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020. In *KPMG International* (Vol. 11).
- Kriyantono, R. (2015). Public Relations and Corporate Social Responsibility in Mandatory Approach Era in Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.041>
- Kurniawan, P. S. (2017). Profesi Certified Sustainability Reporting Specialist, Pelaporan Keberlanjutan, Dan Teori Enterprise (Suatu Tinjauan Mengenai Profesi CSRS dalam Pelaporan Keberlanjutan).

- Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1).
<https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.9478>
- Latifah, S. W., & Luhur, M. B. (2017). Pengaruh Laporan Keberlanjutan Pada Nilai Perusahaan Dan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1).
- Nden, N. (2019). Strategies for Ensuring the Timeliness of Small Business Financial Reporting in Nigeria. In *ProQuest Dissertations and Theses*.
- OJK. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.03/2017. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Oware, K. M., & Mallikarjunappa, T. (2022). CSR expenditure, mandatory CSR reporting and financial performance of listed firms in India: an institutional theory perspective. *Meditari Accountancy Research*, 30(1).
<https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2020-0896>
- Papoutsis, A., & Sodhi, M. M. S. (2020). Does disclosure in sustainability reports indicate actual sustainability performance? *Journal of Cleaner Production*, 260.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121049>
- PWC. (2018). Digital Banking in Indonesia 2018. *PwC Survey, July*.
- Rahmawati, A., Pramasterina, B. H., & Setiawan, D. (2020). Analisis Metode Penelitian pada Bidang CSR di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.2.242>
- Sandri, A. B., Prihatni, R., & Armeliza, D. (2020). Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Keluarga dan Tekanan Karyawan Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2).
- Scherer, A. G., & Palazzo, G. (2011). The New Political Role of Business in a Globalized World: A Review of a New Perspective on CSR and its Implications for the Firm, Governance, and Democracy. *Journal of Management Studies*, 48(4).
<https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00950.x>
- Setyawan, W., Tanzil, N. D., & Rosdin, D. (2022). Pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan dukungan SDGS dalam laporan keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1).
<https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p015>
- Siregar, N. B., Maksun, A., Bukit, R. B., & Badaruddin. (2019). Implementation of IFRS convergence and corporate supply chain management on earnings quality (study on oil plantations companies in Indonesia and Malaysia). *International Journal of Supply Chain Management*, 8(5).
- Tan, G. K. S. (2021). Assembling sustainability reporting in Singapore. *Competition and Change*.
<https://doi.org/10.1177/10245294211020624>
- Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I., Balaam, M., Dignum, V., Domisch, S., Felländer, A., Langhans, S. D., Tegmark, M., & Fuso Nerini, F. (2020). The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. In *Nature Communications* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y>
- Widiastuty, E., & Soewarno, N. (2019). Csr expenditure and company performance: Charity or signal? Evidence from Indonesia. *Quality Innovation Prosperity*, 23(3).
<https://doi.org/10.12776/QIP.V23I3.1273>
- Widyaningsih, G. A. (2020). Urgensi Penerapan Pertimbangan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2).
<https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.157>